

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



**RENJA  
PERUBAHAN**

**Tahun 2021**



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/ 185 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2021

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 80);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 60);
44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 27);
45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | : Dinas Pendidikan                                    |
| Lampiran II  | : Dinas Kesehatan                                     |
| Lampiran III | : RSUD Datu Sanggul                                   |
| Lampiran IV  | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             |
| Lampiran V   | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |

Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Tenaga Kerja
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XV	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVI	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XVIII	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran XIX	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XX	: Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XXI	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran XXII	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran XXV	: Dinas Perdagangan

Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. Penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sebagai pedoman kerja bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.



Rantau, Agustus 2021  
Kepala Dinas Perpustakaan  
Dan Kearsipan Kabupaten Tapin,

H. ZAINAL ABIDIN, S. Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811081990101002

## DAFTAR ISI

	halaman	
KATA		
PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	A. LATAR BELAKANG	I-1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	I-2
	C. DASAR PERTIMBANGAN	I-2
	D. SISTEMATIKA PENULISAN	I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	II-1
	A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021 S/D TRIWULAN II	II-1
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD	III-1
	A. KEGIATAN LANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA	III-1
	B. PERGESERAN DAN PENGHAPUSAN KEGIATAN	III-2
BAB IV	PENUTUP	IV-1

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2021
- Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2021

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sebagai SKPD yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Perpustakaan dan Kearsipan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah, dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin tersebut disusunlah Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan dan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah berjalan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan dapat dilihat melalui pencapaian target program dan kegiatan serta persentase penyerapan anggarannya sehingga untuk memaksimalkan pencapaian target tersebut dilakukanlah pergeseran maupun penambahan serta pengurangan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyerapan anggaran tersebut melalui Perubahan Rencana Kerja yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin dimulai dari usulan setiap bidang beserta seluruh seksi dan juga dari sekretariat berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Memperhatikan hasil evaluasi tersebut perlu dilakukan Perubahan dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan untuk memaksimalkan pencapaian target program dan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai pedoman kerja bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin adalah:

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2021
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2021
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2021 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2021.

## **C. DASAR PERTIMBANGAN**

Dasar penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kerja (RPJMD) Kabupaten Tapin 2018-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 27);
16. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/137-Randal/Bappelitbang/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pertimbangan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD  
s/d Triwulan II Tahun 2021s

##### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN**

**RENJA SKPD**

**A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya**

**B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan**

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SKPD**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 s.d Triwulan II**

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin. Adapun tabel evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada **tabel 2.1** sebagai berikut :

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

Realisasi dari program kerja pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II pada Bab II sebelumnya menjadi bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Tahun 2021 ini meliputi :

#### **A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya**

Semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Program Pengelolaan Arsip

**B. Pergeseran dan penghapusan kegiatan**

Beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami penambahan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada, antara lain terdapat pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Program Pengelolaan Arsip

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Renja perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

#### **BAB IV PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin 2021, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi



**Kepala Dinas Perpustakaan  
Dan Kearsipan Kabupaten Tapin,**

**H. ZAINAL ABIDIN, S. Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811081990101002**

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Tapin**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan									
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	300
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya air dan listrik	Output : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Penyediaan alat tulis kantor	Output:Waktu penyediaan alat tulis kantor (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output:Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Penyediaan makanan dan minuman	Output:Waktu penyediaan makanan dan minuman (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100	12	36	300

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Output : Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Tapin Expo	Output:Jumlah pelaksanaan Tapin Expo (kali)	1	0	1	1	100	1	2	200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output:Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	80%	90%	100%	100%	100	100%	2,8	322.222222
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output:Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Output:Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output:Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	3	3	3	47	1566.666667		50	1666.666667
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output:Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor (bln)	12	12	12	12	100	12	36	300
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Cepatan Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	300

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	13	13	13	13	100	13	39	300
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Output: Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun (laporan)	2	2	2	2	100	2	6	300
	Program Polayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5.97	3.65%	4.48	0.94	20.98214286	4.97	5.9465	99.60636516
	Peningkatan pelayanan dan informasi	Output: Jumlah orang yang dilayani dengan baik (org)	23,047	21856	21,408	21,858	102.5597607	22,226	66,138	288.9701046
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP.	25%	100%	100%	100%	100	50%	2.5	1000
		Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	25%	100%	100%	100%	100	50%	2.5	1000
		Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan	4.20%	2.88%	3.84%	4.23%	110.15625	4.06	4.1312	9836.190476
	Penyediaan bahan perpustakaan	Output: Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (buku)	800	702	800	784	98	800	2286	254
	Pembinaan dan pengembangan pustakawan dan perpustakaan	Output: Jumlah Perpustakaan yang dibina (buah)	40	8	16	16	100	24	48	120
		Output: Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil (org)	40	8	16	16	100	24	48	120
	Program Promosi Perpustakaan	Persentase rata-rata pemanfaatan Perpustakaan	0.56%	1.04%	2.29%	0.87%	37.99126638	1.08%	0.0299	533.9285714
	Pameran dan Promosi Perpustakaan	Output: Jumlah jenis alat promosi yang tercetak (lbr)	3	3	3	3	100	3	9	300

Gerakan minat dan budaya baca	Output: Jumlah pengunjung (pemustaka) (org)	23047	21956	21817	13991	64.12889031	22.226	58173	252.410292
Program Perbaiki Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60%	51.11%	53.33%	45.28%	84.90530858	4.17%	1.0056	167.6
Pengadaan sarana penyimpanan	Output: Jumlah pengadaan sarana penyimpanan (buah)	0	0	1	1	100		1	
Penyusunan Perbup Kearsipan	Output: Jumlah PERBUP Kearsipan yang tersusun (paket)	1	0	1	1	100		1	100
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Output: Jumlah Jadwal Retensi Arsip yang tersusun (buah)	0	0	4	4	100		4	
Pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK	1235	1210	1220	1281	105	1225	3716	300.9906883
Program Penyofarmatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pengelola arsip yang terampil	60%	51.11%	53.33%	53.33%	100	55.55%	1.5999	266.65
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Output: Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah (buah)	27	23	24	24	100	25	72	266.6666667
Bimbingan Teknis Kearsipan	Output: Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan (org)	100	0	50			50	50	50
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Output: Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	12	12	12	12	100	12	36	300
Pengawasan Kearsipan	Output: Jumlah pengelola arsip terampil			2	2	100		2	



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2021				Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2022		Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target Capaian		Pagu Indikatif		Sebelum	Setelah	Target Capaian	Pagu Indikatif			
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							13 = 12-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	19
2.23.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bin)	1. Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	3.588.800	3.588.800	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	3.768.240		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bin)	1. Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	28.715.000	32.051.700	3.936.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	34.284.285		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bin)	1. Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	71.944.100	84.713.100	13.669.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	88.948.755		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1. Waktu penyediaan barang cetakan dan pengandaan (bin)	1. Waktu penyediaan barang cetakan dan pengandaan (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	24.330.200	17.380.100	(-6.950.100)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	18.249.135		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	1. Waktu penyediaan Bahan/material	1. Waktu penyediaan Bahan/material	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	977.000	977.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	1.025.850		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	9.200.000	9.200.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	9.660.000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.06.9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1. Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	186.264.000	249.664.000	63.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	262.147.200		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12bulan 2. 12bulan	1. 12bulan 2. 12bulan	1.480.749.000	1.761.998.000	281.249.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan	1.850.097.900		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 23Bulan	1. 23Bulan	152.570.000	165.456.000	12.886.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 23Bulan	173.728.300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 8Bulan	1. 8Bulan	1.328.179.000	1.596.542.000	268.363.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 8Bulan	1.676.361.100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bin) 3. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan	302.638.250	303.701.250	1.063.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan	318.885.313		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bin)	1. Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	1.901.000	1.914.000	13.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	2.009.700		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bin)	1. Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	173.302.850	173.302.850	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	181.957.393		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bin)	1. Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	127.434.400	128.494.400	1.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	134.928.620		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 2. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 2. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12bulan 2. 12bulan	1. 12bulan 2. 12bulan	41.132.800	45.282.800	4.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan	47.546.940		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bin)	1. Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	33.162.800	36.562.800	3.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	38.393.940		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (bin)	1. Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (bin)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan	1. 12Bulan	7.970.000	8.720.000	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	9.156.000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2021				Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2022		Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target Capaian		Pagu Indikatif		Sebelum	Setelah	Target Capaian	Pagu Indikatif			
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							13 = 12-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	19
2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka 2. Angka rata - rata pemanfaatan Perpustakaan 3. Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP	1. Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka 2. Angka rata - rata pemanfaatan Perpustakaan 3. Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP					1. 4,48% 2. 2,29% 3. 100%	1. 4,48% 2. 2,29% 3. 100%	610.681.300	660.265.700	49.584.400				693.278.985		
2.23.2.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Pengembangan Bahan Pustaka	1. Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Pengembangan Bahan Pustaka	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan 2. 12Bulan	1. 12Bulan 2. 12Bulan	544.182.500	586.587.500	42.405.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan 2. 12Bulan	615.916.875		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.2.2.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah orang yang dilayani dengan baik (org)	1. Jumlah orang yang dilayani dengan baik (org)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 22226org 2. 22226org	1. 22226org 2. 22226org	154.000.000	132.000.000	(-22.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 22226org 2. 22226org	138.600.300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.2.2.01.8	Pengembangan Bahan Pustaka	1. Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (buku)	1. Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (buku)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 800Buku 2. 800Buku	1. 800Buku 2. 800Buku	390.182.500	454.587.500	64.405.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 800Buku 2. 800Buku	477.316.875		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.2.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 2. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1. Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 2. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 1Tahun 2. 1Tahun	1. 1Tahun 2. 1Tahun	66.498.800	73.678.200	7.179.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 1Tahun 2. 1Tahun	77.362.110		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.2.2.02.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1. Jumlah jenis alat promosi yang tercetak (jenis)	1. Jumlah jenis alat promosi yang tercetak (jenis)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 3lbr 2. 3lbr	1. 3lbr 2. 3lbr	15.598.800	31.578.200	15.979.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 3lbr 2. 3lbr	33.157.110		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.2.2.02.3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1. Jumlah penganjur (pemustaka) (org)	1. Jumlah penganjur (pemustaka) (org)	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 22226org 2. 22226org	1. 22226org 2. 22226org	50.900.000	42.100.000	(-8.800.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 22226org 2. 22226org	44.205.000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	Kearsipan															79.006.883		
2.24.2	Program Pengelolaan Arsip	1. Persentase pengelola arsip yang terampil	1. Persentase pengelola arsip yang terampil					1. 53,33% 2. 53,33%	1. 53,33% 2. 53,33%	74.877.400	75.244.650	367.250				79.006.883		
2.24.2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	1. Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan 2. 1Tahun 3. 12Bulan	1. 12Bulan 2. 1Tahun 3. 12Bulan	74.877.400	75.244.650	367.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan 2. 1Tahun 3. 12Bulan	79.006.883		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.2.2.01.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1. Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa arsip yang ditata sesuai NSPK	1. Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa arsip yang ditata sesuai NSPK	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 10SKPD 2. 10SKPD	1. 10SKPD 2. 10SKPD	45.868.400	45.868.400	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 10SKPD 2. 10SKPD	48.161.820		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.2.2.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1. Jumlah arsip yang di polihara (Box) yang sesuai NSPK	1. Jumlah arsip yang di polihara (Box) yang sesuai NSPK	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 20Box 2. 20Box	1. 20Box 2. 20Box	29.009.000	29.376.250	367.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 20Box 2. 20Box	30.845.063		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.3	Program Pertindungan Dan Penyetaraan Arsip	1. Persentase SKPD dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	1. Persentase SKPD dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK					1. 53,33% 2. 53,33%	1. 53,33% 2. 53,33%	33.209.900	37.177.900	3.968.000				39.036.795		
2.24.3.2.01	Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	1. Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12Bulan 2. 12Bulan	1. 12Bulan 2. 12Bulan	33.209.900	37.177.900	3.968.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan 2. 12Bulan	39.036.795		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.3.2.01.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Jumlah SKPD yang Arsipnya Dimusnahkan sesuai NSPK	1. Jumlah SKPD yang Arsipnya Dimusnahkan sesuai NSPK	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 1SKPD 2. 1SKPD	1. 1SKPD 2. 1SKPD	33.209.900	37.177.900	3.968.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 1SKPD 2. 1SKPD	39.036.795		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan